

Interpretasi Kritis atas Sistem Sosial dan Sejarah Pendidikan Islam Modern Pasca Tragedi 11 September 2001

Syahrul¹⁾, Evie Syalviana²⁾

¹⁾Jurusan Syari'ah, STAIN Sorong

E-mail: syahrulhs@gmail.com

²⁾Jurusan Dakwah, STAIN Sorong

E-mail: evsy.psy@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and uncover Ibrahim M. Abu-Rabi's arguments which say that acts of terrorism committed by Muslims are not only related to doctrine, but also related to the historical, social, economic and political roots of the States. Arabic and countries which are predominantly Muslim. This research is a literature research by analyzing a book written by Ibrahim M. Abu-Rabi. This research found that the Islamic world is facing complex problems in the social, ethnic and cultural fields. These problems are influenced by the existence of three factors; modernization, nationalization and religious movements.

Keywords: Ibrahim M. Abu-Rabi', Social, Economy and Politics

Diterima 8 April 2019

Revisi 9 Mei 2019

Disetujui 20 Juni 2019

1. PENDAHULUAN

Tragedi 11 September 2001 menjadi semacam indikator bahwa permusuhan dan peperangan antara orang kafir, yang diwakili Amerika, dengan umat Islam, yang representasikan oleh Alqaidah, senantiasa ada. Meski Alqaidah bukanlah representasi dari Islam seutuhnya dan seluruhnya, tapi di mata masyarakat Amerika dan Negara-negara Barat, Alqaidah dianggap identik dengan Islam itu sendiri. Apalagi, bagi Alqaidah dan beberapa gerakan jihadist, tragedy 11 September seolah menjadi flash back bahwa kebencian dan permusuhan itu memang ada dan setiap saat bisa saja muncul melalui aksi, lalu menelan korban dari kedua belah pihak. Aksi, yang dalam bahasa mereka dinamakan sebagai jihad merupakan senjata yang ampuh dan alasan yang jitu untuk melakukan teror dan kekerasan atas nama agama.

Memang, ada orang yang meyakini bahwa permusuhan dengan yang kafir dan yang tidak sealian atau segolongan adalah bagian dari doktrin keagamaan yang abadi dan susah untuk dihilangkan. Akibatnya, korban bisa saja berjatuh setiap saat, jika ada kesempatan. Contohnya, Bom Bali, Bom Gereja dan Hotel Marriot di Jakarta, 11 September 2001 dan peristiwa-peristiwa sejenisnya. Terkait dengan 11 September, muncul semacam adagium di kalangan masyarakat Amerika dan Eropa yang non-Muslim bahwa kekerasan merupakan bagian dari doktrin keagamaan, khususnya bagi umat Islam. Agama dan kekerasan adalah sebuah entitas yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan, legitimasi kekerasan dan permusuhan bisa ditemukan dalam referensi-referensi dasar umat Islam itu sendiri, seperti Alquran, Hadits dan sejarah perpolitikan umat Islam. Tragedi 11 September dan aksi-aksi jihad yang lain, juga menjadi semacam indikator bahwa aksi bunuh diri, pengeboman dan penembakan yang berakibat jatuhnya korban jiwa, terkadang diperlukan sebagai bukti bahwa mereka yang tidak sepaham dan sealian, tidak layak untuk hidup di dunia ini. Bahkan, hingga saat ini sebagian umat Islam masih meyakini bahwa orang-orang non-Islam (orang kafir) dan umat Islam tidak bisa bersatu ataupun menjalin kerja sama. Jadi, permusuhan dan perselisihan terhadap mereka adalah suatu yang abadi. Keyakinan ini merupakan doktrin yang senantiasa dikembangkan dan disebarluaskan sepanjang sejarah keberadaan umat Islam, khususnya setelah terjadi kemunduran dunia Islam dan kemajuan Negara-negara Barat dan Amerika. Berangkat dari latar belakang di atas penulis ingin mengajukan pertanyaan tentang hal-

hal yang melatarbelakangi terjadinya aksi teror yang dilakukan oleh segelintir orang Islam. Mengapa mereka melakukan aksi tersebut dan faktor apa yang melandasi sebagian orang Islam nekat melakukan aksi bom bunuh diri dan aksi-aksi terorisme yang lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka. Penulis menganalisa dan mendalami tulisan Ibrahim M. Abu-Rabi' yang berjudul *A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History*. Dalam tulisan ini penulis hendak mengajukan beberapa gagasan dan pendapat Ibrahim M. Abu-Rabi' yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa di atas bukan hanya terkait dengan doktrin semata, tapi juga terkait dengan akar sejarah, sosial, ekonomi dan politik Negara-negara Arab dan Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di mana sebagian besar Negara Islam tersebut merupakan bekas jajahan dari Negara-negara Barat yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Bahkan, menurut Abu-Rabi' peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh era modern yang memunculkan Amerika sebagai sebuah Negara dan ideology yang hendak menguasai dunia, khususnya Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam artikelnya, Abu-Rabi' juga memfokuskan pada perubahan sistem pendidikan di Arab Saudi dan beberapa Negara Islam, sebagai dampak dari ideology kekerasan yang berkembang di era modern saat ini, (Abu-Rabi, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Dunia Modern

Sejarah perkembangan dan kemajuan dunia Barat (Erofa) tak bisa dilepaskan dari peranan dunia Islam, sejak abad ke-12 (khususnya di Spanyol) hingga akhir abad ke-15. Negara-negara Erofa yang menemukan momentum kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17, melalui renaissance, berhasil membangun peradaban manusia yang unggul dan modern, mampu menyaingi bahkan mengungguli beberapa peradaban yang ada saat itu, termasuk peradaban Islam. Kemajuan dan perkembangan ini tidak didapat begitu saja, tanpa adanya usaha untuk belajar dan menimba pengalaman dari dunia Islam, selama beberapa abad. Maka wajar jika Dr. Badri Yatim mengatakan bahwa kemajuan Erofa bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional, (Yatim, 2000). Peradaban dan khasanah keilmuan Islam yang diadopsi oleh Barat, ditransfer melalui perang Salib, Sicilia dan kemajuan Islam di Spanyol.

Abad ke-16 dianggap sebagai awal kebangkitan peradaban Erofa. Abad itu pula yang menjadi awal kemunduran dan keterpurukan dunia Islam. Negara-negara Erofa bangkit dan menjadi kekuatan baru dengan menciptakan peradaban umat manusia yang modern. Kebangkitan ini ditandai dengan penemuan-penemuan ilmiah dan inovasi baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Seperti, penemuan rute perjalanan baru yang digunakan sebagai jalur perdagangan, hingga penemuan-penemuan teknologi yang maju dan unggul dalam bidang militer, perindustrian dan perdagangan, (Yatim, 2000). Sejak saat itu, Negara-negara Erofa berhasil menguasai hampir seluruh lini kehidupan umat Islam, termasuk ekonomi, politik dan militer mereka. Sadar akan keunggulan dan kemajuan Negara-negara Erofa, dunia Islam yang memasuki era kemunduran, berusaha bangkit untuk mengejar ketertinggalan mereka. Usaha itu terus berlanjut hingga saat ini. Mulai dari munculnya gerakan-gerakan pembebasan dari system kolonisasi Erofa hingga aksi-aksi yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan umat.

Sebenarnya, ketika berbicara tentang kondisi dunia Islam saat ini, hal itu sulit dilepaskan dari pengaruh tiga kerajaan besar yang muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Ketiga kerajaan tersebut adalah Turki Utsmani di Turki, Safawiyah di Persia dan Mughal di India, (Yatim, 2000). Meski corak dan karakter ketiga kerajaan tersebut berbeda, tapi ketiganya dianggap masih merepresentasikan Islam sebagai sebuah system kekuasaan tunggal yang berbentuk kerajaan (khalifah), yang masih bertahan hingga abad ke-19.

Abad ke-19 pulalah yang menjadi titik puncak kesadaran dunia Islam atas kemunduran mereka dan kemajuan dunia Barat. Kesadaran itu muncul ketika otoritas kepemimpinan tunggal, yang berbentuk khilafah, lenyap dari dunia Islam. Kondisi tersebut merupakan akibat dari perpecahan dan perselisihan yang terjadi dalam tubuh umat Islam sendiri, selama beberapa abad.

Kesadaran itu pula muncul akibat pengaruh dari ekspansi dan kolonisasi Negara-negara Erofa terhadap dunia Islam. Negara-negara Arab dan Negara yang mayoritas beragama Islam dijajah oleh Negara-negara Erofa, selama beberapa abad. Hingga, pada abad ke-19 dunia Islam bangkit melakukan perlawanan terhadap kolonisasi tersebut. Upaya tersebut berhasil memerdekakan beberapa Negara Arab dan Negara Islam yang lain. Meski telah memerdekakan diri dari kaum penjajah, dunia Islam yang telah terpecah menjadi Negara-bangsa tetap saja tertinggal dan terbelakang dari Negara-negara Erofa. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, respon umat Islam pun bermacam-macam. Diantaranya, melalui gerakan modernisasi, nasionalisasi dan menghidupkan kembali gerakan-gerakan sosial keagamaan, (Abu-Rabi, 2002).

Model pertama dapat dilihat dari model modernisasi Tanzimat yang dilakukan pada masa kerajaan Turki Utsmani, (John Obert Voll, 1997). Definisi Tanzimat secara etimologi adalah mengatur, menyusun, memperbaiki atau penjagaan peraturan. Sedangkan definisi Tanzimat menurut epistemologi adalah suatu gerakan pembaharuan di Kerajaan Turki Utsmani. Tokoh-tokoh Tanzimat umumnya terdiri dari pejabat-pejabat tinggi kerajaan Turki Usmani, yang pernah menetap di Barat dan menyaksikan secara langsung kemajuan Barat. Mereka banyak meniru ide-ide dan usaha-usaha pembaruan yang dilaksanakan Negara-negara Barat. Adapun pembaharuan-pembaharuan pada zaman Tanzimat meliputi: bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pendidikan, bidang administrasi dan bidang perdagangan. Tujuan dari Tanzimat adalah untuk membuat sistem hukum resmi yang menjamin kebebasan dan kesamaan hak rakyat, menciptakan Turki yang modern, menyediakan dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat untuk perkembangan ekonomi, teknologi dan sebagainya, (Zainal Abidin, 2004).

Model yang kedua adalah gerakan nasionalisasi, seperti yang diusung oleh Soekarno di Indonesia, Muhammad Ali Jinnah di Pakistan dan Kemal at-Taturk di Turki. Ketiganya tampil merespon kondisi umat Islam di negaranya, yang dianggap sedang lemah, dengan berusaha menantang dan melawan peradaban Erofa yang maju. Gerakan-gerakan nasionalist di beberapa Negara Muslim bangkit melawan penjajah, untuk memerdekakan Negara mereka dari system kolonisasi. Namun, nasionalisasi mereka tetap mengadopsi model dan nilai-nilai filosofis Negara-negara Barat, terutama dalam konsep kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (Abu-Rabi, 2002).

Model yang ketiga adalah gerakan-gerakan sosial yang bersifat keagamaan. Gerakan-gerakan ini memiliki ciri dan karakter yang berbeda-beda, sesuai dengan lokasi dan zamannya. Adapun karakter dan ciri dari gerakan sosial keagamaan tersebut, dibagi menjadi empat. Pertama, gerakan keagamaan yang muncul sebelum adanya kolonisasi di Negara-negara Muslim. Misalnya, wahabiyah di Arab Saudi yang berusaha untuk menghidupkan kembali praktek-praktek keagamaan yang bersifat ortodoks dan fundamental dalam bidang hukum dan teologi. Revitalisasi praktek-praktek keagamaan tersebut merupakan akibat dari dekadensi moral dan keagamaan yang melanda masyarakat Muslim di beberapa tempat, terutama di Arab Saudi. Gerakan ini berkolaborasi dengan pihak kerajaan Saudi, untuk merealisasikan harapan dan tujuan tersebut, (Abu-Rabi, 2002).

Kedua, gerakan sosial keagamaan yang muncul pada masa kolonisasi, seperti NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Ada juga yang mengatakan, Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaah Islamiyah di India. Gerakan-gerakan sosial keagamaan yang muncul pada masa kolonisasi berusaha untuk mereformasi system pendidikan dan system politik Islam, lalu mengimplementasikan syariah Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, (Abu-Rabi, 2002).

Ketiga, pasca-kolonial, seperti gerakan Jihadist di Mesir pada tahun 1970-an dan 1980-an, Taliban di Afganistan, (Akbar S. Ahmed, 2002). Kedua gerakan ini dianggap sebagai gerakan ekstrim yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Taliban muncul sebagai reaksi dari kegagalan kaum sekuler membentuk masyarakat madani di Afganistan dan kegagalan gerakan Islam modern melakukan integrasi di kalangan masyarakat Afganistan. Taliban

muncul ketika kekacauan terjadi di Afganistan sekitar tahun 1990-an, tepatnya ketika Amerika kembali menduduki Negara itu, (Abu-Rabi, 2002).

Keempat, pasca nation-state (Negara-bangsa), seperti gerakan Bin Laden di Saudi Arabia dan di beberapa Negara yang lain. Gerakan Bin Laden berusaha untuk memperluas jaringan dan pengaruh mereka di kalangan masyarakat Saudi, (Abu-Rabi, 2002). Gerakan Bin Laden berpendapat bahwa pihak keluarga kerajaan Saudi yang didukung oleh pemuka agama wahabiyah menciptakan Negara modern tanpa nilai-nilai dasar dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses demokrasi. Itulah sebabnya, Bin Laden lahir sebagai reaksi atas modernisasi yang dilakukan oleh pihak kerajaan Saudi, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kelompok Taliban, Gerakan Jihadist Mesir dan Bin Laden muncul sebagai reaksi dan keputusan terhadap situasi dan kondisi umat Islam yang tercerai-berai, tanpa adanya pemimpin tunggal dan system pemerintahan yang mampu menaungi seluruh umat Islam. Gerakan-gerakan tersebut berusaha untuk menghidupkan kembali wacana Islam yang ortodoks dan fundamental dalam kehidupan umat Islam, (Abu-Rabi, 2002). Mereka meyakini bahwa Islam adalah system yang mengatur semua lini kehidupan masyarakat di dunia dan akhirat. Jadi, interpretasi mereka tentang Islam merupakan ajaran yang harus digunakan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan bernegara.

Sistem Pendidikan di Dunia Islam, antara Modern dan Tradisional

Dunia Islam telah mengalami modernisasi pada abad yang lalu. Hampir semua Negara tersebut mengalami proses modernisasi pada zaman penjajahan atau setelahnya, pada era Negara-bangsa. Modernisasi berhasil menyebarkan pengaruhnya ke semua lini kehidupan masyarakat Islam. Dalam bidang pendidikan, meskipun di beberapa Negara Islam, system pendidikan tradisional belum sepenuhnya mengalami modernisasi, tapi atas bantuan dan desakan pemerintah setempat dan pihak asing, system pendidikan tersebut perlahan-lahan mengalami modernisasi, baik dari segi kurikulum maupun orientasinya, (Abu-Rabi, 2002).

Beberapa ilmuwan Islam meyakini bahwa modernisasi dalam bidang pendidikan merupakan langkah yang mesti ditempuh oleh umat Islam untuk mengejar ketertinggalan mereka. Perkembangan sistem pendidikan yang unggul dan teknologi yang canggih yang dimiliki oleh Negara-negara Erofa, menjadikan umat Islam tertinggal dan terbelakang dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Sehingga, untuk belajar ilmu sains, teknologi, dan bidang keilmuan lainnya, umat Islam harus berguru kepada bangsa Erofa dan Amerika. Hal itu terjadi karena di hamper setiap bidang keilmuan yang dikembangkan oleh mayoritas masyarakat Islam, khususnya dalam bidang agama, merupakan ilmu yang bersifat expired dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan keilmuan Barat yang selalu update untuk merespon segala kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.

Meski demikian, seiring dengan munculnya Negara-bangsa, sistem pendidikan tradisional menemukan momentumnya, untuk mengembangkan pengaruhnya di masyarakat. Bahkan, setelah Negara-negara Islam memperoleh kemerdekaan mereka, elite-elite politik bekerja keras dan menata kembali system kelas yang bias agama di masyarakat, untuk memperkuat status quo mereka. Salah satunya melalui system pendidikan. Akademisi menciptakan dikotomi orientasi system pendidikan di masyarakat dengan dukungan elit penguasa. Maka tidak heran jika di beberapa Negara Muslim, muncul system pendidikan yang orientasinya kepada Negara-negara Barat dan yang berorientasi kepada Negara-negara Arab Islam. Contohnya, di Pakistan. Sistem pendidikan tradisional digunakan oleh pihak pemerintah (Zia al-Haq) untuk menyebarkan ideology Islam yang radikal dan fundamental. Pemerintah merekrut pelajar dari sekolah-sekolah tradisional untuk dijadikan sebagai Mujahidin dan relawan perang melawan kekuatan Uni Soviet di Afganistan, (Abu-Rabi, 2002).

Di samping itu, Muhammad Arkoun, (Abu-Rabi, 2002). berpendapat bahwa sejarah Islam sebagai pemikiran, budaya, system keimanan lintas-sosial dan lintas-sejarah dan system norma/nilai masih terbatas dalam wacana akademik dan pemikiran, lalu digunakan untuk melegitimasi ideology yang ada. Itulah kiranya mengapa di beberapa Negara Islam, wacana keilmuan Islam dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah. Kajian mereka hanya seputar persoalan sharia dan Fikih yang tidak kritis, terkesan politis dan tidak relevan dengan situasi dan kondisi umat Islam saat ini. Seolah-olah tidak ada jarak yang jelas antara isu-isu teologi dan politik, isu-

isu teologi dan sosial. Sehingga, perspective ilmu-ilmu sosial dan filsafat kritis tidak ditemukan dalam kajian keagamaan. Bahkan, kajian tentang ilmu sosial dan filsafat dianggap sebagai bid'ah dalam bidang sharia dan fikih, (Abu-Rabi, 2002).

Hal itu pula yang terjadi di Negara-negara Islam yang telah maju dan berkembang, seperti Arab Saudi dan Negara-negara Teluk yang lain. Jutaan dolar didonasikan oleh pihak pemerintah untuk memajukan system pendidikan, untuk menyokong dan memperkuat ideology mereka di masyarakat. Para pelajar disetting untuk sekedar memperdebatkan persoalan-persoalan klasik dalam Islam, seperti persoalan kaidah Bahasa Arab dan sebagainya.

Di beberapa Negara Muslim, system pendidikan sekular tidak jauh lebih baik dari pendidikan tradisional. Di Pakistan misalnya, jebolan sekolah-sekolah sekular dianggap lemah, kurang teliti dan cermat serta mudah disogok oleh pihak lain. Yang terjadi kemudian, muncul penyakit-penyakit sosial baru di masyarakat, seperti: egoisme, korupsi, minder dan penakut. Di samping itu, jebolan-jebolan pendidikan tradisional masih terlena dengan nostalgia kejayaan masa lalu Islam yang bersifat tekstual. Mereka hanya sibuk menghapal teks-teks yang dianggap suci itu, tanpa adanya keinginan dan kemampuan untuk merespon tantangan kehidupan di era modern. Misalnya, banyak lulusan jurusan shariah yang beruntung bekerja pada bidang spesialisasinya, disetting agar tidak dapat merespon permasalahan kehidupan sosial yang sebenarnya dan problem perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dewasa ini, (Abu-Rabi, 2002). Bahkan di beberapa Negara Arab dan Muslim, bidang sharia sengaja dikonstruksi untuk mengukuhkan ideology tertentu. Puncaknya ketika perang dingin berakhir, authoritarianime yang berkembang di beberapa Negara Muslim membatasi interpretasi dalam agama yang dianggap tidak sejalan dan sesuai dengan ideology pemerintah.

Abu-Rabi mengungkap bahwa ada hal yang menarik di abad yang modern ini, politisasi jurusan-jurusan keagamaan oleh pihak pemerintah, malah memunculkan aktivis sharia yang bukan berasal dari kampus-kampus Islami, tapi kampus-kampus sains yang sekuler. Kampus-kampus Islami malah melahirkan kaum kiri yang kritis, (Abu-Rabi, 2002). Rif'at al-Said berpendapat bahwa persoalan lain yang ada pada system pendidikan Islam, khususnya di Mesir, yaitu lebih mengutamakan hafalan dari pada budaya kritis terhadap teks. Ini bisa dilihat dari sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah, swasta, dan sekolah-sekolah Al-Azhar. Hasilnya, beberapa jebolan mereka menjadi orang-orang yang literalis dan radikal, (Abu-Rabi, 2002).

Fenomena lain, Negara-negara Arab yang maju dan berkembang menggalakkan pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, untuk sekedar belajar sains dan bisnis di luar negeri. Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Negara-negara Barat dan Amerika. Sehingga, sulit untuk menemukan mahasiswa yang konsen dengan kajian sharia, dengan menggunakan perspective ilmu-ilmu sosial dan ilmu filosofis yang kritis. Kajian sharia dengan menggunakan perspective lain dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Akhirnya, sikap kritis dan kritik dalam studi-studi keagamaan tidak berkembang atau mandeg.

Elit Penguasa, Kaum Intelektual dan Gerakan Keagamaan di Negara-Negara Arab.

Pada umumnya, penguasa-penguasa Arab tidak menghendaki system demokrasi berlaku di Negara mereka. Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi dan kekuasaan mereka di masyarakat. Maka tidak mengherankan bila mayoritas Negara-negara Muslim menganut system otoriter. Misalnya, Pakistan selama beberapa decade terus dipimpin oleh rezim militer yang otoriter sejak 1947, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin selama beberapa tahun oleh Soeharto yang juga sangat otoriter. Itu pula yang terjadi dengan beberapa Negara Arab yang lain, (Abu-Rabi, 2002).

Pada tahun 1967 dunia Arab dibuat kaget oleh Israel dengan kekalahan dalam sebuah perang. Meski kekalahan itu tidak mengubah system politik secara drastic, tapi sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial, keagamaan dan pendidikan di dunia Arab Islam. Sejak itu, hubungan antara agama dan masyarakat memainkan peran dalam membentuk gerakan-gerakan keislaman pada abad setelahnya.

Pasca kekalahan itu, kesadaran pun mulai nampak dalam diri para elit politik Negara-negara Arab. Beragam respon muncul akibat kekalahan tersebut. Diantaranya, simbol-simbol agama dieksploitasi untuk melanggengkan posisi dan kekuasaan elit politik di masyarakat. Agama dipahami bukan hanya sebagai symbol dari kesalehan, tapi digunakan untuk mencapai kepentingan politik dan sosial.

Dalam bidang pendidikan, respon dari kalangan intelektual Islam juga beragam. Misalnya, intelektual secular merespon isu keterbelakangan dan kekalahan tersebut dengan tiga corak orientasi pemikiran. Pertama, nasionalis arab, yang direpresentasikan oleh Qustantine Zurayk. Kedua, kritis model marxis, yang dilakukan oleh Adonis, Ghaly Sukri, Abdallah Laroui, Halim Barakat, dan lain-lain. Model liberal atau pencerahan yang dilakukan oleh Zaki Najib Mahmud di Mesir. Fuad Zakariya, (Abu-Rabi, 2002). Pemikir ini sangat kecewa dengan kekalahan Negara-negara Arab atas Israel. Mereka berpendapat bahwa kekalahan tersebut terjadi karena Negara-negara Arab belum sepenuhnya modern dan modernisasi yang mereka ikuti tidak serupa dengan model yang dimiliki kaum zionis. Pemikir Lebanon, Hassan S'ab mengatakan bahwa konflik itu merupakan konflik peradaban, yang berkuat seputar penguasaan system teknologi, (Abu-Rabi, 2002). Dunia Arab kalah karena mereka tidak mampu menyaingi perkembangan teknologi dan sains Israel.

Beberapa pemikir Arab juga kecewa dengan elit-elit politik Arab dan menuduh penguasa tersebut yang mesti bertanggung jawab atas kekalahan itu. Bahkan, ada yang menuduh Islam sebagai biang keladi atas kekalahan dan kemunduran tersebut. Oleh karena itu, untuk merebut kembali kejayaan Islam, Negara-negara Arab dan Islam harus mengikuti modernisasi Negara-negara sekuler, dengan menjauhkan simbol-simbol keagamaan dari ruang public, (Abu-Rabi, 2002). Belakangan, muncul pula pemikir Islamist, yang pernah beraliran kritis marxis dan nasionalis. Mereka adalah intelektual independent yang tidak percaya lagi dengan pemimpin-pemimpin Arab dan menjadikan Alquran sebagai pegangan untuk mencapai kestabilan sosial di Negara-negara Arab. Pemikir seperti, Muhammad Imarah dan Adil Hussain dari Mesir, Rashid al-Ghannaousi dari Tunisia, Munir Syafiq dari Palestina adalah representasi dari pemikir yang dimaksud. Mereka berusaha menciptakan wacana keislaman baru yang lebih rasional tanpa adanya pengaruh dan tendensi dari Negara-negara Arab yang kaya. Wacana pemikiran mereka murni atas keprihatinan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Mereka menggunakan pendekatan langsung untuk memecahkan permasalahan tersebut,

Dalam bidang politik, elit pemerintah Negara-negara Arab disandera oleh proyek kepentingan colonial Barat dan Israel atas kedaulatan Negara mereka, khususnya setelah terjadi proses perdamaian antara Israel dan beberapa Negara Arab. Pemikir Rashid al-Ghannoushi berpendapat bahwa “kekerasan merupakan konsekuensi dari proses relasi antara Negara arab dengan masyarakat saat ini”. Artinya, “modernisasi” dipergunakan oleh pihak Barat untuk mendukung system diktator mereka di masyarakat Arab, dengan bantuan para elit penguasa Arab yang modernis. Sehingga, amat sulit untuk membedakan antara proyek modernisasi dan westernisasi, (Abu-Rabi, 2002).

Terakhir, respon yang dilakukan oleh gerakan-gerakan keagamaan revivalis atau fundamental. Gerakan keagamaan ini berpendapat bahwa agama (Islam) harus menjadi ideologi dan pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Mereka menginginkan pembentukan Negara baru yang berdasar pada asas dan prinsip yang Islami, (Abu-Rabi, 2002).

4. PENUTUP

Dewasa ini, dunia Islam sedang menghadapi problematika dalam bidang sosial, etnik dan kebudayaan yang sangat kompleks. Problematika tersebut dipengaruhi oleh adanya tiga factor; modernisasi, nasionalisasi dan gerakan keagamaan. Ketiga gerakan itu merupakan representasi Islam sejak akhir abad ke-19. Mereka berjuang untuk bebas dari system penjajahan Negara-negara Barat dan membentuk Negara-bangsa yang sesuai dengan karakter gerakan tersebut. Politik authoritarianisme berkembang di dunia muslim karena di dukung oleh tiga factor. Pertama, gagalnya tokoh-tokoh nasionalis dalam pemberlakuan system demokrasi di beberapa Negara Islam. Kedua, keterlibatan militer dalam arena politik. Ketiga, dukungan dari Negara-negara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Rabi, I. M. (2002). *A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History, dalam 11 September; Religious Perspectives on The Causes and Consequences*. England: Oneworld Publication.
- Akbar S. Ahmed. (2002). *Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- John Obert Voll. (1997). *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Yogyakarta Titian Ilahi Press.
- Yatim, B. (2000). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zainal Abidin. (2004). *Tanzimat dan Pembaharuannya*. *Hunafa*, Vol. 1, IAIN Palu.